

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penyajian pelaporan, serta penginterpretasian atas hasil transaksi dan kejadian keuangan yang berhubungan dengan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah terkait akuntabilitas, daya banding, relevansi, konsistensi, serta keandalan laporan keuangan, maka diterapkanlah Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap instansi pemerintah baik yang terdapat pada tingkat pusat maupun tingkat daerah wajib mengikuti hal-hal yang diatur dalam SAP, salah satunya adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Hal ini ditujukan untuk menunjukkan ketaatan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah terhadap APBN/APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, sedangkan LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Terkait dengan LRA dan LO, setiap pengguna anggaran dalam pemerintahan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan tersebut tidak terkecuali oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag dituntut dapat menjalankan pengelolaan administrasi dan keuangannya sesuai SAP yang berlaku, baik terkait pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan pengeluaran yang dijalankan tiap tahunnya. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2020, belanja pada Kemenag terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Pengeluaran Kemenag yang memiliki jumlah paling besar dalam laporan keuangannya adalah belanja pegawai yakni sebesar Rp39.211.897.062.155. Jumlah tersebut menunjukkan realisasi anggaran sebesar 100,09% dari pagunya yang sebesar Rp39.178.058.944.000. Pos akun belanja pegawai memiliki sifat rentan mengalami tindak kecurangan, seperti kecurangan pelaporan jam kerja, ketidaksesuaian antara daftar gaji dengan daftar karyawan yang ada, atau terjadi penambahan pegawai fiktif. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus dalam pengelolaannya baik tentang klasifikasi, kesesuaian tujuan pengeluaran, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas kesesuaian antara pengelolaan belanja dan beban pegawai pada Kementerian Agama Tahun

2020 terhadap peraturan yang berlaku, sehingga penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja Pegawai di Kementerian Agama Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Kementerian Agama?
2. Bagaimana kesesuaian pendefinisian dan pengklasifikasian beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama?
3. Bagaimana kesesuaian pengakuan dan pencatatan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama?
4. Bagaimana kesesuaian pengukuran beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama?
5. Bagaimana kesesuaian penyajian dan pengungkapan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penulisan yang hendak dicapai dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Kementerian Agama
2. Mengetahui kesesuaian pengakuan dan pencatatan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama

3. Mengetahui kesesuaian pengakuan dan pencatatan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama
4. Mengetahui kesesuaian pengukuran beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama
5. Mengetahui kesesuaian penyajian dan pengungkapan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada tinjauan beban dan belanja pegawai tahun anggaran 2020 yang ada pada Kementerian Agama.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan dan memperdalam pengetahuan penulis tentang beban dan belanja pegawai.

2. Bagi Kementerian Agama

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh Kementerian Agama untuk meninjau penerapan akuntansi beban dan belanja pegawainya serta sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja kantor di masa depan apabila terdapat hasil tinjauan yang perlu dijadikan bahan perbaikan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, selanjutnya penulis akan memaparkan teori dan peraturan yang dijadikan sebagai landasan dalam penulisan karya tulis tentang tinjauan penerapan akuntansi beban dan belanja pegawai.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis yang dikaji, gambaran umum objek penulisan, dan paparan hasil tinjauan penulis terhadap pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Agama, pendefinisian dan pengklasifikasian beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama, pengakuan dan pengukuran beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama, dan penyajian dan pengungkapan beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas uraian bab-bab sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah dibuat serta saran yang mungkin diberikan oleh penulis sebagai masukan untuk penerapan akuntansi beban dan belanja pegawai pada Kementerian Agama nantinya.